



RILIS

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023 – 2024
KE KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 7 – 11 FEBRUARI 2024**

Pelaksanaan kunjungan kerja reses pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI dengan mengunjungi 3 (tiga) daerah yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 7 Februari 2024.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat, Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungannya ke Kabupaten Karawang, yang dipimpin oleh Saan Mustopa, M.Si yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi, serta didampingi pula oleh pejabat dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI, yakni dari Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.

Adapun topik yang menjadi fokus dari kunjungan kerja reses ke Kabupaten Karawang tersebut adalah berkaitan dengan kesiapan dan persiapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karawang. Hal ini mengingat pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024 tinggal menyisakan hitungan hari untuk sampai pada pelaksanaan pemungutan suara. Sehubungan dengan hal tersebut, kesiapan penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan setiap tahapan menjadi faktor yang krusial agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan lancar, damai, aman, dan kondusif. Melalui kunjungan kerja reses ini, Komisi II DPR RI berharap mendapatkan gambaran secara utuh terhadap persiapan dan kesiapan Kabupaten Karawang secara umum, termasuk berbagai permasalahan yang mungkin masih dihadapi oleh pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang dalam upaya menyukseskan agenda besar nasional ini.

Dalam kunjungan ke Kabupaten Karawang, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Bupati Karawang (diwakili oleh Asisten II Kabupaten Karawang) beserta jajaran, KPU Kabupaten Karawang, Bawaslu Kabupaten Karawang, dan unsur forkopimda Kabupaten Karawang (TNI, Polri, dan Kejaksaan). Disamping itu, Tim kunjungan Kerja Komisi II DPR RI juga melakukan peninjauan langsung ke gudang logistik Pemilu 2024 Kabupaten Karawang.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Karawang, dan Bawaslu Kabupaten Karawang, serta dari hasil peninjauan langsung ke gudang logistik, Komisi II DPR RI berpandangan bahwa secara umum Kabupaten Karawang telah siap untuk melaksanakan Pemilu Serentak 2024, dan untuk itu Komisi II DPR RI juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, penyelenggara pemilu, dan seluruh pihak terkait lainnya, termasuk berbagai elemen masyarakat yang telah berupaya untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karawang.

Khusus terkait dengan hibah untuk Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Kabupaten Karawang telah merealisasikan hibah anggaran tahap 1 (40%) kepada KPU Kabupaten Karawang dan Bawaslu Kabupaten Karawang, dan anggaran tersebut telah ditransfer ke masing-masing pihak.

Beberapa catatan dari hasil kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karawang antara lain sebagai berikut:

- Dari total 6.890 TPS di Kabupaten Karawang, 4 (empat) diantaranya merupakan TPS lokasi khusus, yakni di Lapas kelas II-A Karawang.
- Terdapat 7 lokasi yang tidak mendapatkan jaringan internet (blank spot), dimana terhadap TPS-TPS di lokasi tersebut akan di-support dengan modem mobile, dan untuk yang fasilitas listriknya tidak memadai akan di-support juga dengan genset.
- Untuk TPS yang lokasinya terpencil ataupun yang rawan bencana, KPU melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karawang dan instansi terkait lainnya telah menyiapkan lokasi cadangan.
- Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih terus dilakukan, baik melalui sosialisasi maupun dengan mengoptimalkan perekaman bagi warga yang belum memiliki KTP-el.
- Logistik sudah sebagian besar terdistribusi, sedangkan untuk kerusakan dan kekurangan surat suara maupun kotak suara sudah dilaporkan dan dimintakan pengantiannya.
- Bimtek, sosialisasi, dan monitoring terkait mekanisme dan peraturan terus dilakukan secara berjenjang kepada penyelenggara adhoc untuk menjaga agar setiap penyelenggara memiliki pemahaman yang sama terhadap teknis pelaksanaan dan regulasi.
- Perlu ada perhatian khusus terhadap penggunaan aplikasi SIREKAP karena di setiap kecamatan hanya diberikan 1 akun admin dan 1 akun operator. Bagi daerah yang jumlah TPS-nya banyak akan memakan banyak waktu.

Menanggapi berbagai penyampaian dari Pemerintah Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Karawang, dan Bawaslu Kabupaten Karawang, Komisi II DPR RI memberikan catatan antara lain sebagai berikut:

- Komisi II DPR RI meminta agar KPU dan Bawaslu di Kabupaten Karawang benar-benar mandiri, netral, profesional, dan memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu, serta tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dan intimidasi dari pihak manapun.

- Komisi II DPR RI meminta agar koordinasi yang telah terjalin sejauh ini dapat terus ditingkatkan sehingga berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Karawang dapat segera dieliminir atau dicarikan solusinya.
- Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, dan para penyelenggara Pemilu untuk terus mengoptimalkan sosialisasi terkait Pemilu Serentak 2024, terutama kepada para pemilih pemula, untuk mendorong tingginya tingkat partisipasi masyarakat.
- Komisi II DPR RI menekankan kepada KPU Kabupaten Karawang untuk benar-benar memberikan pemahaman sekaligus penegasan bahwa aplikasi SIREKAP hanyalah merupakan alat bantu, sedangkan yang tetap menjadi rujukan utama adalah hasil perhitungan manual.
- Komisi II DPR RI mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bupati Karawang dalam menjaga netralitas ASN, dan sepenuhnya mendukung untuk memberikan sanksi yang tegas kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas tersebut.
- Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memberikan jaminan kesehatan kepada para penyelenggara pemilu, baik berupa asuransi maupun fasilitas pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, seperti tenaga medis, ambulans, dan sebagainya).

Kab. Karawang, 11 Februari 2024,

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karawang.